

**BAB IV**

**RESPON AMERIKA SERIKAT TERHADAP PERKEMBANGAN NUKLIR**

**IRAN PADA MASA AHMADINEJAD**

Pada Bab IV menjelaskan mengenai respon Amerika Serikat, negara barat dalam program nuklir Iran melalui latar belakang hubungan Amerika Serikat dengan Iran dan intervensi Amerika Serikat pada pemerintahan Bush serta upaya Amerika Serikat menghentikan melalui penerapan sanksi oleh Dewan Keamanan PBB.

**A. Intervensi Amerika Serikat Terhadap Perkembangan Program Nuklir Iran**

Pasca berakhirnya perang dingin, di mana kekuatan dunia dicirikan oleh sistem unipolar, Amerika Serikat juga menggunakan kesempatan sebagai negara adidaya untuk mendapatkan keuntungan dari Iran. Kondisi geografis yang strategis menjadikan Iran sebagai wilayah yang sering diperebutkan negara-negara lain. Di samping itu, ketertarikan lain terhadap Iran berkenaan dengan tuduhan bahwa ia memiliki dan mengembangkan nuklir serta senjata pemusnah massal yang sewaktu-waktu bisa menjadi ancaman internasional. Amerika Serikat dan sekutunya Israel selalu berupaya menjadikan isu nuklir Iran sebagai ancaman yang sangat membahayakan dunia internasional.

Amerika Serikat pernah mempunyai sejarah hubungan yang harmonis dengan Iran saat Iran dipimpin oleh rezim Shah Pahlevi. Namun, hubungan tersebut berakhir

dengan jatuhnya rezim Shah Pahlevi oleh kelompok mullah Syi'ah di bawah kepemimpinan Imam Khomeini. Hubungan Iran dan AS menjadi rumit setelah terjadinya revolusi Islam Iran pada tahun 1979, yang menjadi awal terputusnya hubungan diplomasi kedua negara. Iran di bawah kepemimpinan Khomeini sangat menentang penindasan Barat, khususnya AS. Amerika sendiri tidak tinggal diam merespon negara para mullah tersebut. Berbagai cara dan kebijakan dikeluarkan oleh pemerintah AS untuk mendiskreditkan Iran pasca revolusi Islam. Amerika Serikat menggunakan kekuatan hegemoniknya untuk “menyerang” program nuklir Iran. Ini sangat tampak ketika Iran dipimpin Presiden Mahmoud Ahmadinejad dan AS berada di bawah kepemimpinan Presiden George W. Bush. Kedua pihak saling serang kata-kata dan saling mendiskreditkan. Ahmadinejad, misalnya, dalam suatu kesempatan menyatakan bahwa pemberitaan negatif yang dikeluarkan oleh Amerika dan sekutunya terhadap negara Republik Islam Iran adalah kebohongan; yang menyampaikan berita tersebut adalah sebuah kejahatan. Ia juga menyatakan bahwa demokrasi dan isu hak asasi manusia merupakan alat imperialis Amerika dan sekutunya sebagai dalih hegemoni dan untuk memperkokoh kekuatan Amerika di dunia internasional.

Ahmadinejad menilai bahwa Amerika Serikat, Israel, dan sekutu Eropa-nya (Jerman, Perancis, Inggris) serta lembaga dunia PBB dan media-media besar yang ternama sudah dikuasai oleh Yahudi (Ardison, 2010). Pemerintah AS mengatakan Iran sebagai negara poros setan yang dapat membahayakan dunia internasional.

Bahkan, setiap kali terjadi aksi teroris atau kemunculan partai Islam di negara tertentu, AS selalu menuduh Iran sebagai dalangnya. Amerika selalu menjadikan Iran sebagai salah satu objek pembahasan politik luar negeri Amerika. Bahkan Isu tersebut diangkat sebagai sebuah kebijakan luar negeri Amerika yang populer untuk menaikkan popularitas seorang presiden dan pengambil kebijakan Amerika Serikat.

Tidak lama setelah Iran mengumumkan pemulihan kembali program nuklirnya pada 11 April 2006, Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad menyatakan bahwa Iran telah berhasil mencapai 3,5% pengayaan uranium yang dihasilkan melalui 164 fasilitas *centrifuges* (fasilitas penelitian dan pembangkit nuklir) tahap pertama. Menanggapi hal tersebut negara-negara Barat terutama Amerika Serikat mulai mengkhawatirkan bahwa program nuklir Iran ditujukan untuk membangun senjata nuklir, meskipun menurut banyak ahli, termasuk IAEA, uranium dalam kadar 3.6 persen sebagaimana yang telah berhasil dicapai oleh fasilitas-fasilitas pengayaan di Iran, tidak cukup untuk membuat sebuah bom (Xinhua, 2006). IAEA memberikan laporan bahwa Iran hanya melakukan pengayaan hingga 3,6%, jumlah yang jauh dibawah standar minimal yang dibutuhkan untuk membuat senjata nuklir, yaitu sebesar 90% (Agency)

Pada tanggal 26 Agustus, sebuah reaktor pembangkit air berat (*heavy water plant*) secara resmi beroperasi untuk mendukung kinerja reaktor penelitian dan pembangkit yang masih dalam tahap konstruksi. Reaktor tersebut rencananya akan selesai dibangun pada tahun 2009. Meskipun IAEA telah menunjukkan sikap yang

berlawanan dengan rencana ini, namun reaktor tersebut juga telah direncanakan untuk dapat memproduksi plutonium yang menurut pemerintah Iran akan digunakan untuk kepentingan penelitian kesehatan (Agency). Disamping itu Iran juga mengkonfirmasi bahwa ahli-ahli nuklirnya telah berhasil menyelesaikan proses pembangunan 164 *centrifuge* tahap kedua, pada tanggal 25 Oktober 2006.

Menindak lanjuti perkembangan program nuklir Iran dan posisinya yang bersikeras untuk tetap menjalankannya, negara-negara Barat menyikapi dengan mengembangkan sikap-sikap persuasif sekaligus juga melalui penekanan penekanan sebagai sebuah respon terhadap program nuklir Iran. Termasuk upaya-upaya untuk menemukan solusi diplomatis mengenai isu nuklir Iran. Berkaitan dengan konsistensi Iran dalam kegiatan pengayaan, Dewan Gubernur IAEA pada tanggal 4 Februari 2006 mengadopsi sebuah resolusi dalam rapat darurat PBB yang membahas laporan-laporan mengenai program nuklir Iran. Iran kemudian menanggapi hal ini dengan sikap yang keras, yaitu dengan menyatakan bahwa Iran tidak akan patuh dan tunduk pada penekanan-penekanan semacam itu (Agency)

Pada bulan Juni tahun 2006, 5 anggota tetap Dewan Keamanan PBB yaitu Inggris, China, Perancis, Russia dan Amerika Serikat ditambah dengan Jerman (P5+1), menyetujui sebuah proposal baru yang akan ditawarkan kepada pemerintah Iran. proposal tersebut memuat insentif yang ditujukan untuk membujuk Iran menunda pengayaan uranium, sekaligus juga kemungkinan pemberian sanksi apabila Iran menolak untuk memberlakukan penundaan (Agency). Proposal ini juga dinilai sebagai proposal yang lebih baik dari yang sebelumnya pernah diajukan oleh negara-

negara Eropa. Dikatakan lebih baik karena juga mengadopsi kebutuhan-kebutuhan Iran (Ingram K. P.-D., 2006). Beberapa elemen penting dalam proposal tersebut diantaranya adalah (Ingram I. D., 2006)

1. Kesiediaan Amerika Serikat untuk melakukan dialog dengan Iran.
2. Pengakuan terhadap fasilitas konversi uranium di Isfahan.
3. Pusat penelitian bahan bakar nuklir internasional di Russia yang melibatkan Iran.
4. Pasokan bahan bakar yang diperlukan untuk program nuklir Iran.
5. Pengakuan terhadap hak-hak sah Iran untuk mengembangkan teknologi nuklir dengan tujuan damai.
6. Kerjasama pada bidang energi termasuk investasi pada sektor infrastruktur gas dan minyak, serta asistensi dalam konservasi energi dan teknologi yang dapat diperbarui.
7. Forum politik regional baru yang melibatkan Iran dan negara-negara lain dikawasan, untuk mendiskusikan jaminan keamanan, dan kawasan Timur Tengah yang bebas dari senjata pemusnah masal.

Namun demikian, dalam proposal tersebut juga terdapat satu hal yang dapat dikatakan justru menghambat jalannya proses negosiasi yaitu syarat-syarat prakondisi yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh Iran. Syarat tersebut mengharuskan Iran untuk menghentikan semua aktifitas terkait pengayaan uranium. Proses negosiasi untuk mencari solusi melalui upaya-upaya diplomasi hanya mungkin dilaksanakan apabila Iran menerima dan melaksanakan prakondisi yang ditentukan oleh UE dan

Amerika Serikat, yaitu penundaan penuh. Hal inilah yang tidak disetujui oleh Iran, bahkan dipandang sebagai tindakan yang bersifat tidak adil, dominatif, arogan, dan cenderung memaksakan kehendak. Dalam pemahaman negara-negara Barat, Iran membutuhkan teknologi nuklir dan mungkin senjata nuklir sebagai sebuah penangkal atau *deterrent* terhadap kemungkinan serangan yang dapat dilakukan oleh Amerika Serikat atau Israel (Ingram I. D., 2006). Lebih jauh negara-negara Barat juga melihat niat Iran untuk mewujudkan teknologi nuklir memiliki keterkaitan yang kuat dengan tujuan politik faksi garis keras Iran yang direpresentasikan oleh Presiden Ahmadinejad (Ingram I. D., 2006)

Pemerintah Amerika Serikat meneruskan pelabelan atas Iran sebagai *rogue states*. *Rogue states* pengganti istilah "negara komunis"; yang dalam periode Perang Dingin dicap sebagai "buas-biadab", yang harus disapu bersih, karena membahayakan demokrasi dan perikemanusiaan (Abdulgani, 2017). Bagi kebanyakan masyarakat Iran, dukungan tidak langsung Amerika Serikat terhadap kapabilitas nuklir Israel dan Pakistan, dan perjanjian transfer teknologi nuklir kepada India yang sudah lebih dulu memiliki senjata nuklir, terlihat sebagai sebuah hipokrisi. Hipokrisi cara terbuka menyatakan memiliki sikap atau bertingkah laku tertentu, tetapi kemudian bertindak dengan cara yang tidak konsisten dengan sikap atau tingkah laku tersebut. (Byrne, 2005)

Sebelum terjadinya tragedi 11 September 2001, Pemerintahan Presiden Bush dapat dikatakan tidak terlalu signifikan dalam menentukan arah politik luar negeri terhadap Iran. Namun demikian setelah terjadinya tragedi 11 September 2001,

kebijakan Amerika Serikat terhadap Iran mengalami perubahan yang cukup signifikan. Di antaranya dalam merencanakan kampanye militer dan perubahan rezim terhadap negara-negara yang dianggap tergabung kedalam *axis of evil*. Pada masa pemerintahan Presiden Clinton, Iran dimasukkan kedalam kategori *rogue states* sedangkan pada masa pemerintahan Presiden Bush, Iran digolongkan ke dalam *axis of evil*. Penggolongan tersebut berkaitan erat dengan perkembangan doktrin keamanan nasional Amerika Serikat pasca serangan teroris pada 11 September 2001, dan juga kampanye perang terhadap terorisme Amerika Serikat menganggap negara-negara yang dicurigai memberikan bantuan atau dukungan kepada teroris tidak jauh berbeda dengan teroris itu sendiri. Diantara negara-negara yang diklasifikasikan kedalam *axis of evil* adalah Iran. *Axis of evil* merupakan poros setan yang menggambarkan pemerintah bahwa pemerintahannya dituduh mensponsori terorisme dan mencari senjata pemusnah massal seperti Iran, Irak, dan Korea Utara yang digambarkan oleh George W. Bush. Hal ini juga didorong oleh kuatnya anggapan bahwa Iran memberikan bantuan dan dukungan aktifitas teroris di Timur Tengah, mengembangkan dan memiliki senjata pemusnah masal, disamping aspek historis hubungan kedua negara yang tidak harmonis.

Bagi UE3 kemungkinan penerapan sanksi yang lebih berat disikapi dengan hati-hati mengingat penerapan sanksi atau resolusi yang berat dapat diinterpretasikan oleh Pemerintah Amerika Serikat sebagai legitimasi atas aksi-aksi militer unilateral di masa yang akan datang sebagaimana yang pernah terjadi di Irak (Ingram K. P.-D., 2006, p. 4). Secara bersamaan, UE3 memiliki keinginan untuk menyelesaikan

masalah-masalah program nuklir Iran melalui pendekatan yang jauh lebih persuasif seperti negosiasi, mengingat negara-negara tersebut juga memiliki kepentingan energi dan komersialnya di Iran. (Ingram I. D., 2006)

Negara-negara UE3 (Jerman, Inggris, Perancis) semenjak tahun 2004 telah berupaya untuk melakukan negosiasi dengan Iran khususnya mengenai program nuklir. Secara umum proses negosiasi yang ketika itu berjalan tidak lancar dengan Iran dapat dilihat sebagai sebuah uji coba terhadap kebijakan luar negeri Uni Eropa setelah sempat terjadi perbedaan pendapat yang cukup signifikan pada isu perang Irak pada tahun 2003 (Ingram I. D., 2006, p. 6) Penundaan sementara program nuklir Iran pada tahun 2004 dilihat sebagai sebuah keberhasilan dari diplomasi Uni Eropa. Tetapi ketika pada tahun 2005 Iran memutuskan untuk menjalankan kembali program nuklirnya karena kebutuhan energi yang semakin mendesak dan tidak adanya itikad baik dari negara-negara Barat dalam proses negosiasi tersebut, UE3 melihat ini sebagai sebuah langkah yang menentang pendirian mereka, sehingga mengarahkan kebijakan diplomasi Uni Eropa ke arah yang lebih tegas (Ingram I. D., 2006, p. 6). Sebenarnya Uni Eropa bisa saja menjatuhkan sanksinya sendiri yang sesuai dengan kebutuhan mereka, dalam rangka mendukung sanksi yang sebelumnya dikeluarkan oleh Amerika Serikat. Namun demikian, banyak negara-negara Eropa lain selain UE3 yang mulai enggan untuk meneruskan ketergantungan energi atau aktifitas bisnis internasional lain hanya kepada Rusia atau Cina, dan mulai melihat Iran untuk peluang kerjasama baru. Disamping itu, di kalangan Uni Eropa sendiri banyak negara-negara yang menentang opsi militer yang sering menjadi wacana khususnya



oleh Amerika Serikat. Meskipun beberapa pemimpin kunci Uni Eropa seperti Perdana Menteri Inggris Tony Blair dan Kanselir Jerman Angela Merkel, juga memperlihatkan sikap yang ambigu mengenai kemungkinan opsi militer. Mengingat opsi tersebut secara realistis dapat dijadikan sebagai sebuah instrumen diplomasi yang kuat (Ingram I. D., 2006). Sikap keras Amerika Serikat terhadap Iran terlihat pada isi dari dokuman yang menjadi pegangan Amerika Serikat dalam menetapkan kebijakan pertahanan dan keamanan di negaranya, yang berbunyi

*“Our strong preference and common practice is to address proliferation concerns through international diplomacy, in concert with the key allies and regional partners. If necessary, however, under long-standing principles of self defense, we do not rule out the use of force before attacks occur, even if uncertainty remains as to the time and place of the enemy’s attacks. When the consequences of an attack with (weapons of mass destruction) are potentially so devastating, we cannot afford to stand idly by as grave dangers materialize. This is the principle and logic of preemption. The place of preemption in our national security strategy remains the same. We will always proceed deliberately, weighing the consequences of our actions. The reasons for our actions will be clear, the force measured, and the cause just (C.lovelace, 2006)*

Petikan diatas merupakan isi dari dokumen NSS-2002 yang dikeluarkan Bush pasca peristiwa 11 September 2001, yang membuktikan bahwa Amerika akan melakukan tindakan secara keras terhadap segala ancaman yang berkaitan dengan penggunaan senjata pemusnah massal, termasuk di dalamnya ancaman potensial yang muncul dari negara Iran berkaitan dengan penggunaan nuklir. Isu ini muncul ke permukaan sebagai reaksi Amerika Serikat terhadap pernyataan dari Presiden Iran, Ahmadinejad yang menyatakan kebenciannya terhadap Israel dan keinginannya untuk menghancurkan sekutu erat Amerika Serikat tersebut. Dengan adanya dokumen itu, Amerika Serikat juga dilegalkan untuk melakukan penyerangan terlebih dahulu terhadap negara yang dikategorikan bermasalah atau lebih dikenal dengan sebutan *Rogue State*. Kriteria-kriteria Roque State berdasar US National Security Strategy adalah sebagai berikut:

1. Negara yang pemerintahannya bertindak opresif, brutal terhadap rakyatnya, serta mengksplotasi sumber daya nasionalnya demi kepentingan penguasa.
2. Bersiap mengabaikan hukum internasional, mengancam negara-negara di sekitarnya.
3. Memiliki senjata pemusnah massal serta teknologi militer yang maju yang digunakan untuk mengancam, ofensif, atau mencapai tujuan agreif rezim penguasa.
4. Menjadi sponsor terorisme yang bersifat global.

5. Menolak implementasi dan penghargaan nilai-nilai kemanusiaan dan memperlihatkan sikap bermusuhan dengan Amerika Serikat.

Menurut kategori *Rogue State* seperti yang telah dijabarkan ciri-cirinya oleh dokumen kebijakan Amerika yaitu NSS-2002, Iran termasuk ke dalam kategori negara yang mengancam keamanan Amerika dan juga secara internasional. Iran termasuk dalam ciri-ciri negara yang mengabaikan hukum internasional.

### **B. Upaya Amerika Serikat Mempertahankan Hegemoninya di Timur Tengah Melalui Dewan Keamanan PBB**

Amerika Serikat dalam upaya-upaya penjatuhan sanksi melalui Dewan Keamanan PBB kepada Iran. latar belakang historis Revolusi Islam Iran pada tahun 1979 merupakan salah satu peristiwa besar yang mengganggu kepentingan Amerika Serikat dan sekutunya di kawasan Timur Tengah, dengan demikian dapat dikatakan hampir tidak terdapat faktor kepercayaan atau *trust* dalam hubungan kedua negara tersebut. Amerika Serikat meyakini bahwa tujuan akhir dari pengembangan teknologi nuklir yang dilakukan oleh Iran adalah menciptakan senjata pemusnah massal, sekaligus merupakan ancaman terhadap sistem perekonomian dan politik yang sedang berjalan. Sejak penolakan resmi pemerintah Iran terhadap proposal yang diajukan oleh negara-negara Barat pada bulan Agustus 2006, perwakilan Amerika Serikat di PBB John Bolton segera memulai pendekatan-pendekatan intensif untuk mendorong negara-negara Eropa agar menyetujui penerapan sanksi yang lebih berat melalui

## Resolusi Dewan Keamanan PBB (Diplomatic Efforts on Iran's Nuclear Issue Ran into Deadlock)

Ketika pada tahun 2002 program nuklir Iran mulai banyak disorot sebagai masalah internasional, Amerika Serikat dan UE3 (Inggris, Perancis, Jerman) kembali terlibat aktif dalam proses negosiasi dan diplomasi untuk meminta Iran menghentikan program nuklir damai dengan dasar kekhawatiran bahwa program nuklir damai tersebut merupakan upaya untuk menutup-nutupi keinginan Iran untuk memiliki senjata nuklir. Proses negosiasi dan diplomasi baik antara Iran dengan UE3 tidak berjalan tepat sesuai dengan keinginan UE3 ataupun Amerika Serikat yang memang tidak terlibat langsung mengingat tidak adanya hubungan diplomatik dan relasi yang buruk antara Iran dan Amerika Serikat. Amerika Serikat lebih banyak terlibat dengan cara menekan atau berupaya untuk meyakinkan UE3 agar sejalan dengan keinginan mereka. Terutama agar membawa masalah program nuklir Iran ke Dewan Keamanan PBB dengan tujuan untuk menjatuhkan sanksi yang lebih keras (Ingram K. P.-D., 2006). Upaya Amerika Serikat untuk meyakinkan UE3 agar membawa program nuklir Iran menjadi krisis internasional yang dibahas dalam Dewan Keamanan PBB, dapat dikatakan cukup berhasil dengan dikeluarkannya Resolusi Dewan Keamanan PBB 1696 dan 1737 pada tahun 2006, 1747 pada tahun 2007 dan 1803 pada tahun 2008.

Amerika Serikat dan UE3 melalui Dewan Keamanan PBB menjelaskan bahwa mereka masih belum cukup yakin bahwa IAEA telah melakukan inspeksi menyeluruh

dan menjamin bahwa program nuklir Iran cukup transparan meskipun dalam beberapa laporan temuan IAEA dari November 2003 secara konsekuen menyatakan bahwa tidak ditemukan adanya aktifitas militer yang berkaitan dengan program nuklir Iran, walaupun memang potensi akan hal tersebut cukup kuat. Dewan Keamanan PBB kemudian meminta Iran untuk menghentikan semua aktifitas terkait pengayaan dan pemrosesan uranium, termasuk aktifitas riset dan pengembangan, dan memberikan kesempatan satu bulan untuk melaksanakan hal tersebut atau diancam akan dikenakan sanksi ekonomi dan sanksi diplomatis. Kesemua hal tersebut diadopsi kedalam Resolusi 1696 (2006) Dewan Keamanan PBB. Dimana 14 negara mendukung resolusi tersebut dan satu negara menentang, yaitu Qatar yang menyatakan bawa Dewan Keamanan sebaiknya memberikan kesempatan beberapa hari kepada Iran untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari IAEA mengenai program nuklirnya. mengingat Iran hanya terlambat beberapa hari dalam menyelesaikan jawaban dan bahwa secara prinsipil Iran menyetujui paket konsesi yang ditawarkan oleh negara-negara Barat.

Resolusi 1696 ini juga menyatakan bahwa penghentian aktifitas pengayaan, sebagaimana kepatuhan sepenuhnya Iran terhadap ketentuan yang diberlakukan oleh IAEA, dapat menghasilkan suatu solusi negosiasi dan diplomasi yang dapat menjamin bahwa program nuklir Iran adalah benar untuk tujuan damai. Lebih jauh, Resolusi 1696 dapat dikatakan merupakan hasil dari tekanan-tekanan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan UE3, yang menginginkan pemberhentian total dari program

nuklir Iran, dengan ancaman pengenaan sanksi apabila Iran tidak mematuhi resolusi tersebut. (Ingram K. P.-D., 2006, p. 2) Permintaan Amerika Serikat dan UE3 agar Iran menghentikan program nuklirnya melalui resolusi 1696 tersebut tidak dipatuhi oleh Iran.

Dewan Keamanan PBB dalam sidangnya yang ke 5612 memutuskan untuk memberlakukan Resolusi 1737 (2006) yang diarahkan untuk menjatuhkan sanksi berupa pelarangan aktifitas impor dan ekspor dari material-material yang digunakan dalam program nuklir Iran, dan juga membekukan asset finansial dari individu atau entitas yang memiliki keterlibatan dalam proses pengayaan Uranium. Dewan Keamanan PBB secara kolektif memberlakukan Resolusi 1737 (2006) dan mewajibkan Iran untuk menghentikan semua aktifitas yang berkaitan dengan pengayaan dan menghentikan program pembangunan reaktor air berat untuk kemudian akan dilakukan verifikasi oleh IAEA terhadap seluruh aktifitas tersebut. Dewan Keamanan PBB secara spesifik juga memutuskan bahwa semua negara agar menghentikan pasokan, penjualan atau transfer, yang dapat digunakan atau ditujukan bagi Iran, atau peralatan dan perlengkapan serta teknologi, aktifitas pengayaan, atau pengembangan sistem persenjataan nuklir. Dewan Keamanan PBB juga mewajibkan IAEA untuk memberikan laporan mengenai apakah Iran telah melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diharuskan dalam Resolusi sesuai jangka waktu yang diberikan selama 60 hari.

Pada bulan Maret 2008 dalam Sidang Dewan Keamanan PBB yang ke 5848, Dewan Keamanan mengadopsi resolusi 1803 (2008) dengan empat belas negara mendukung, dan satu negara anggota tidak tetap yaitu Indonesia abstain. Resolusi tersebut disahkan berdasarkan Pasal 41 Bab ke VII dari Piagam PBB (terkait batasan-batasan mengikat diluar Angkatan Bersenjata), yang memutuskan bahwa Iran diharuskan untuk menghentikan segala kegiatan pengayaan sesuai penjelasan paragraph 2 pada resolusi 1737. Resolusi 1803 ini merupakan resolusi yang dimaksudkan untuk memperberat penerapan sanksi terhadap Iran sehubungan penolakannya untuk menghentikan kegiatan pengayaan terkait program nuklirnya. Dewan Keamanan juga meminta kepada semua negara untuk memberlakukan pengawasan dan pembatasan (*vigilance and restraint*) terhadap perpindahan dan pergerakan atau transit material, atau bahan baku yang dapat digunakan dalam kegiatan pengayaan nuklir atau persenjataan nuklir, disekitar wilayahnya yang berhubungan atau memiliki keterkaitan dengan Iran.

Gambar 4.1 Lambang DK PBB



Gambar 4.2 Lambang Organisasi IAEA

